

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke 4 Bulan April 2021 (tanggal 16 s.d 22 April)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Aryo Wasisto

Peneliti Pertama/Politik

aryo.wasisto@dpr.go.id

SUPERVISI PEMUNGUTAN SUARA ULANG

ISU ATAU PERMASALAHAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merekomendasikan beberapa wilayah di Indonesia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU diupayakan sebagai jalan moderat untuk konflik horizontal lebih lanjut yang dapat mencederai keadilan dalam demokrasi elektoral. PSU membutuhkan supervisi yang lebih maksimal karena PSU berakar dari sengketa. Oleh karena itu diperlukan kesiapan yang ekstra dari penyelenggara pemilu dan aparat keamanan sebagai elemen utama suksesnya PSU.

Dari segi keamanan, langkah antisipasi dimulai dengan memetakan tingkat kerawanan pemilihan. Daerah rawan konflik dan kecurangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam memproses segala bentuk pelanggaran. Kecurangan yang sering muncul menjelang PSU, yakni politik uang dan melakukan kampanye terselubung.

Beberapa wilayah rawan konflik seperti Boven Digoel direkomendasikan untuk menempatkan personel TNI dan Polri. Selain itu, untuk mencegah konflik, diperlukan komunikasi dengan pihak pemimpin di wilayah tersebut. Di wilayah konflik, sebelum melaksanakan PSU, para kandidat juga direkomendasikan menandatangani kesepakatan damai.

Dari segi teknis, supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum menyangkut masalah rancangan tahapan, program, dan jadwal PSU, ketersediaan anggaran, dan penyediaan logistik pemilihan. Di wilayah yang terdampak bencana seperti Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, membutuhkan perubahan tempat akibat permasalahan keterjangkauan. Persoalan ketersediaan anggaran, juga menjadi persoalan, KPU mencatat 9 daerah kekurangan anggaran dalam melaksanakan PSU. Di Nabire dan Boven Digoel, pemerintah daerah belum memiliki anggaran yang memadai sehingga belum dapat melaksanakan rekomendasi MK.

SUMBER

Kompas, 21 April 2021; papuainside.com, 21 April 2021; bisnis.com, 19 April 2021; kompas.id, 16 April 2021.